

ABSTRAK

Konflik pertanahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama dalam 12 tahun terakhir sejak reformasi bergulir, cukup banyak yang melibatkan warga dan TNI. Salah satu persoalan sengketa tanah antara warga dan anggota TNI tersebut yaitu terjadi antara warga Kelurahan Maharatu dan Kelurahan Sidomulyo Mulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai dengan TNI-AU Pekanbaru terkait Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.297/III/2011 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 312/XI/1987 Tentang Pencadangan Areal Tanah Di Kelurahan Simpang Tiga Dan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Untuk Lokasi Pengembangan Pangkalan Udara Pekanbaru.

Diberlakukannya SK Gubernur Riau Nomor: 297/III/2011 telah menimbulkan ketegangan antara masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga dan Sidomulyo Timur dengan TNI-AU Pekanbaru. Surat Keputusan Gubernur Riau tersebut mengakibatkan: Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), Dinas Tata Kota Pekanbaru juga tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan masyarakat dilarang memindahtangankan, mendirikan bangunan serta menanami sesuatu jenis tanaman di atas tanah masyarakat yang diklaim TNI-AU Pekanbaru sebagai tanah pencadangan untuk lokasi pengembangan pangkalan TNI-AU Pekanbaru.

Masalah pokok dalam penelitian ini ada adalah: Bagaimana kewenangan Gubernur Riau dalam keputusan Nomor: KPTS.297/III/2011 Tentang pencadangan areal tanah untuk pengembangan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) Pekanbaru?. Apakah sudah tepat dasar hukum yang diterapkan dalam SK Gubernur Riau Nomor: KPTS.297/III/2011 untuk penggunaan pencadangan tanah pengembangan TNI-AU Pekanbaru? Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah Masyarakat untuk penggunaan pencadangan tanah pengembangan TNI-AU Pekanbaru dalam SK Gubernur Riau Nomor: KPTS. 297/III/2011?

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa SK Gubernur Riau Nomor: KPTS. 297/III/2011 ditetapkan bukan untuk melaksanakan Perda melainkan karena Permohonan dari Komandan Pangkalan TNI AU Pekanbaru Nomor: B/021/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Permohonan Revisi Tanah Pencadangan TNI-AU Pekanbaru. SK Gubernur Riau Nomor: KPTS. 297/III/2011 juga mengandung kecacatan antara lain: cacat baik dari segi waktu maupun isi/materinya, tidak sesuai dengan UU dan Peraturan yang menjadi konsideran hukumnya, pelaksanaan SK Gubernur ini merupakan upaya pemaksaan sepihak pemerintah kepada masyarakat, sementara pembebasan berikut ganti rugi lahan masyarakat tidak ada kejelasan sampai saat ini, dan hal ini telah merugikan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

ABSTRACT

The recent land conflicts, especially in the last 12 years since the reformation have taken place, have involved quite a lot of people and TNI. One of the problems of land disputes between the citizens and members of the TNI is between people in Kelurahan Maharatu and Sidomulyo Mulyo Timur Subdistrict Marpoyan Damai District with TNI-AU Pekanbaru related to the Decision of the Governor of Riau Number: KPTS.297 / III / 2011 on the Change of Decree of the Governor of the Region Level I Riau Number: KPTS. 312 / XI / 1987 about Land Area Creation in Kelurahan Simpang Tiga and Sidomulyo Subdistricts Siak Hulu District Level II Region Kampar For Location Development of Air Base Pekanbaru.

The enactment of Decree of the Governor of Riau Number: 297 / III / 2011 has caused tension between people in Simpang Tiga and Sidomulyo Timur with TNI-AU Pekanbaru. The Decree of the Governor of Riau resulted in: The National Land Agency (BPN) refused to issue Certificate of Property Right (SHM), Building Rights (HGB), Pekanbaru City Planning Agency also did not issue Building Permit (IMB) and the community was prohibited to transfer, Planting a kind of plant on community land which the TNI-AU Pekanbaru claimed as a reserve land for the development site of the Pekanbaru TNI-AU base.

The main problem in this research is: 1). How is the authority of Riau Governor in decision Number: KPTS.297 / III / 2011 About the provision of land area for the development of Air Force Indonesian Air Force (TNI-AU) Pekanbaru? 2). Is it appropriate that the legal basis applied in the Decree of the Governor of Riau Number: KPTS.297 / III / 2011 for the use of the provision of land for the development of TNI-AU Pekanbaru? 3). How to protect the law against the rights of land Society for the use of land provision of development of TNI-AU Pekanbaru in Decree of Governor of Riau Number: KPTS. 297 / III / 2011?

The results of this study can be known that the Decree of the Governor of Riau Number: KPTS. 297 / III / 2011 is stipulated not to implement the local regulation but because the petition from the commander of the Air Force Base Pekanbaru TNI Number: B / 021 / I / 2011 dated January 15, 2011 on the Application for Revision of the Land of the Air Force Reserves of Pekanbaru. Decree of the Governor of Riau Number: KPTS. 297 / III / 2011 also contains defects such as: disability in terms of time and content / material, not in accordance with the Law and Regulations that become legal considerations, the implementation of the Governor's Decree is a unilateral coercion of government to the public, while the liberation of the following land compensation Society has no clarity to date, and this has harmed and injured the sense of community justice.